

KEDEKATAN STRATEGIS INDONESIA DALAM RIVALITAS AS-CINA PASCA COVID-19

Ahmad Anwar¹, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo²
¹²Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sains Al Qur'an
¹aan@unsiq.ac.id

Abstract

This study develops a Proximity Index to measure Indonesia's proximity to the United States and China, particularly after the COVID-19 pandemic. The index integrates three dimensions (economic, military, and diplomatic) to operationalize proximity as a multidimensional index. The time-series analysis reveals structural asymmetry: Indonesia's military ties remain consistently anchored to the US; economic dependence leans more toward China; and diplomacy is a fluctuating driver of the index. The study identifies three inflection points (2019, 2022, and 2024) when diplomatic oscillations (the COVID-19 pandemic, Indonesia's G20 presidency, and domestic leadership transition) recalibrate overall proximity. The statistical predictions suggest a gradual shift toward China due to strengthening economic integration. These findings also underscore that Indonesia's foreign policy reflects a rebalancing of its composition, rather than a complete restructuring.

Keywords: US-China rivalry, foreign policy, composite indeks, Indonesia

PENDAHULUAN

Persaingan Amerika Serikat (AS) dan Cina telah menjadi salah satu 'fitur' dalam politik internasional abad 21. Keduanya berlomba-lomba baik secara politik (militer-keamanan & pengaruh global) maupun ekonomi (perdagangan, investasi, bahkan teknologi). Dalam konteks ini, persaingan kedua negara memiliki orientasi strategis yang kontras namun saling bergesekan. Amerika Serikat berfokus pada "Kompetisi Strategis" (Strategic Competition) untuk mempertahankan supremasi globalnya, sementara Cina mengejar "Kemandirian Teknologi" (Technological Independence) untuk melepaskan diri dari ketergantungan asing (Alfian et al., 2025). Di saat bersamaan, pandemi COVID-19 muncul tidak hanya sebagai isu keamanan manusia, namun juga mengancam keamanan negara (*national security*) (Bapat, 2020; Boylan et al., 2021). Untuk menghadapi dua hal ini — persaingan dua *super power* dan pandemi global — setiap negara dituntut untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya, termasuk Indonesia sebagai

middle power (negara menengah)¹ dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara (Anwar, 2023; Kuik, 2021).

Disrupsi logistik dan perjalanan akibat COVID-19 telah membatasi diplomasi tatap muka dan menggeser pasokan barang. Sementara itu, vaksin menjadi kanal baru kerjasama internasional. Indonesia bekerja sama dengan Cina untuk keperluan uji klinis – dan di saat bersamaan juga menerima donasi vaksin dari AS. Di sisi lain, Perang Ukraina pecah di saat Indonesia menerima mandat presidensi G20 pada tahun 2022. Isu ini menuntut Indonesia melakukan manuver politik agar forum ekonomi tetap berjalan di saat suara negara anggota terbelah. Peristiwa-peristiwa pasca-COVID ini menegaskan posisi asimetri ekonomi dan diplomasi struktural: apakah netral atau condong ke arah tertentu (*proximate*) (Moon et al., 2021; Sulaiman et al., 2021).

Dalam ranah teoritis, kita memahami bagaimana realisme mengasosiasikan konsep *proximity* dengan aliansi dan kemampuan material (Mearsheimer, 2001); liberal-institusionalisme menekannya pada interdependensi ekonomi (Keohane & Nye, 1973); konstruktivisme menyoroti norma yang membangun relasi antar negara (Wendt, 1999). Teori-teori *mainstream* yang berkembang ini memang membantu memberi fondasi konseptual. Namun dalam hal untuk mengetahui “seberapa dekat” suatu negara dengan kekuatan besar tertentu, mereka tidak banyak memberikan ukuran menyeluruh. Hal ini terutama karena kebanyakan studi lebih sering menggunakan pendekatan kualitatif (Acharya, 2018; Finnemore & Sikkink, 1998; Waltz, 2010)

Sementara itu, studi kuantitatif tentang pola *alignment middle power* masih terbatas. Penelitian yang sudah ada cenderung fokus pada satu domain analysis (*single domain*). Misalnya hanya mengukur dengan suara voting di PBB saja atau nilai perdagangan bilateral saja. Akibatnya, masing-

¹ Istilah yang diperkenalkan oleh Giovanni Botero untuk menyebutkan sebuah negara yang cukup kuat untuk punya otoritas independent namun tidak cukup kuat secara politik untuk disebut sebagai superpower (Botero, 1589).

masing kurang menangkap kompleksitas multi-dimensional dari kedekatan suatu negara (Bailey et al., 2017; García-Herrero et al., 2025).

Dengan demikian, kita memerlukan ukuran yang multidimensional. Penelitian ini menawarkan bahwa pendekatan komposit indeks yang sering digunakan dalam berbagai keilmuan dapat diterapkan dalam metode politik. Dalam hal ini khususnya politik luar negeri Indonesia. Ia dapat menjadi alternatif metodologis untuk mengintegrasikan berbagai dimensi hubungan bilateral ke dalam satu metrik yang komprehensif.

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana pola kedekatan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan Cina berubah pasca-COVID-19? Dengan menggunakan Indonesia *Proximity Index* (mengadopsi metode indeks komposit) yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, militer, dan diplomasi, studi ini menganalisis pergeseran kedekatan Indonesia dari 2014 hingga 2024 (sebelum dan sesudah pandemi). Studi ini disusun dalam beberapa bagian. Pertama adalah bagian pendahuluan ini. Kedua tinjauan pustaka yang berupaya mengidentifikasi gap metodologis. Bagian selanjutnya yaitu tentang metode dalam menyusun *Proximity Index*. Hasil analisis kuantitatif serta diskusi tentang dinamika yang berkembang yang mempengaruhi perubahan pola *proximity* ada di bagian selanjutnya. Terakhir, bagian penutup menyimpulkan beberapa catatan.

Tinjauan Pustaka

Berbagai studi menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan politik internasional (Ali, 2020). Krisis kesehatan global ini tidak hanya mengganggu kerangka kerjasama internasional yang sudah mapan. Ia juga berimbas pada perilaku negara dalam proses pengambilan keputusan (Pevehouse, 2020). Pandemi mendorong negara-negara untuk menata ulang prioritas kepentingan nasionalnya, terutama soal isu kesehatan publik dan stabilitas ekonomi. Situasi ini pada gilirannya memengaruhi pola diplomasi (Alhammadi, 2022). Pandemi menjadi momentum bagaimana guncangan global dapat memaksa negara untuk mengevaluasi kembali posisi strategisnya masing-masing dalam politik internasional (Posocco & Watson, 2023). Dalam konteks Indonesia, dinamika

tersebut semakin kompleks karena berlangsung di tengah rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Cina. Sebagai negara *middle power* dengan wilayah strategis dan ekonomi tersebar di Asia Tenggara, Indonesia perlu melakukan positioning yang tepat.

Dalam studi Hubungan Internasional, metode kuantitatif untuk menilai seberapa dekat suatu negara dengan kekuatan besar masih belum banyak. Indeks *Power and Influence* (kekuatan dan pengaruh), misalnya, hanya membantu sedikit pemahaman, tetapi tidak menawarkan penjelasan *proximity* sebagai sebuah metrik relasional. Lowy's Asia Power Index menyintesis 131 indikator dari delapan dimensi dengan normalisasi *distance-to-frontier* dan bobot ahli. Namun, indeks ini mengurutkan kemampuan dan pengaruh, bukan kedekatan relasional (Lowy Institute, 2024). CINC (*Correlates of War's Composite Index of National Capability*) menggabungkan masukan material menjadi bagian kemampuan yang sederhana. Metode ini memungkinkan perbandingan jangka panjang tetapi mengabaikan institusi, gagasan, dan interdependensi (Singer, 1963). *Global Soft Power Index* menangkap daya tarik melalui survei persepsi (berdasarkan konsep Joseph Nye), yang berguna untuk memahami pengaruh reputasi. Sayangnya ia tidak dapat membedakan antara "*being admired*" dengan "*being aligned*" (Nye Jr, 2004). *The Fragile States Index* mengukur level bagaimana negara dapat dikategorikan sebagai negara gagal. Namun para kritikus menilai indeks yang digunakan dapat mengaburkan dinamika tertentu dan dapat menghasilkan urutan peringkat yang menyesatkan (Ferreira, 2017; The Fund for Peace, 2023). Beberapa indeks di atas memang dapat menawarkan suatu teknik, tetapi tidak memberikan ukuran standar keselarasan relasional.

Untuk mengukur *alignment* suatu negara secara lebih akurat, pendekatan domain tunggal dianggap lebih efektif. Misalnya, kesamaan dalam voting di Majelis Umum PBB (UNGA) sering digunakan karena datanya transparan dan mudah direplikasi. Aspek ini bisa digunakan untuk mengukur kedekatan diplomatik antar negara. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena tidak selalu mencerminkan realitas sesungguhnya. Misalnya, saat suatu negara abstain, saat isu yang dibahas sangat spesifik,

atau ketika pemungutan suara hanya bersifat simbolis, hal-hal ini tidak diukur secara mendalam (García-Herrero et al., 2025).

Indikator lain adalah kerja sama militer, seperti transfer senjata atau latihan bersama. Aspek ini dapat menunjukkan ukuran keselarasan keamanan (*defence alignment*). Studi terbaru bahkan menemukan bahwa ekspor senjata dari Cina dapat meningkatkan kesamaan voting negara penerima dengan Cina. Artinya, faktor ini dapat menunjukkan hubungan sebab-akibat yang lebih kuat (He et al., 2025).

Teori-teori *mainstream* memberikan pandangan yang berbeda-beda. Realisme memperlakukan *proximity* sebagai fungsi dari *power*. Aliansi, penempatan pangkalan militer, dan jaringan pertahanan menjadi sinyal untuk mengukur kedekatan militer (Walt, 1985). Liberalisme mengedepankan interdependensi dan pentingnya institusi. Perdagangan, *foreign direct investment* (FDI), dan keanggotaan dalam sebuah organisasi internasional adalah ukuran ekonomi yang penting (Keohane, 1989; Keohane & Nye, 1973). Sementara itu, konstruktivisme menekankan pentingnya norma dan identitas. *Proximity* muncul dalam pola keselarasan narasi dan identitas dalam politik antar negara (Wendt, 1992, 1999).

Pendekatan *hedging* dalam literatur Hubungan Internasional menawarkan strategi jalan tengah bagi negara-negara kecil dan menengah. *Hedging* berarti tidak memihak salah satu kubu secara mutlak, melainkan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang bersaing. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan di tengah ketidakpastian geopolitik (Kuik, 2016, 2021). *Hedging* bisa menjadi strategi praktis dalam politik luar negeri bagi Indonesia. Kita tidak bisa mengukur posisinya dengan cara yang sederhana, seperti pro-AS atau pro-Cina. Namun yang menjadi catatan, keselarasan dalam *hedging* suatu negara bisa memiliki banyak dimensi dan tidak hanya satu pilihan.

Di sisi lain, secara metodologi, indeks dari rumpun ilmu lain dapat menjadi inspirasi. Istilah umum yang sering digunakan adalah indeks komposit (*composite index*) atau indeks yang menggabungkan berbagai faktor

untuk membuat sebuah ukuran yang menyeluruh. Salah satu contohnya adalah *Human Development Index* (HDI). Indeks ini mengintegrasikan berbagai indikator menjadi *composite measures* (ukuran komposit) (Klugman et al., 2011). Contoh lain adalah *World Governance Indicators* (WGI) yang menggabungkan penilaian ahli dengan juga mengatasi kekurangan data dengan teknik imputasi (Kaufmann et al., 2010). Meski demikian, WGI dikritik karena bias kultural (Kurtz & Schrank, 2007). Metode *principal component analysis* (PAC) memberi bobot *data-driven*, namun hasilnya sering sulit ditafsirkan (Jolliffe, 2006). Analisis *event data* membantu analisis dengan cara meng-*coding* interaksi diplomatik ke dalam angka (Goldstein, 1992). Meski demikian, metode ini rentan terhadap klasifikasi yang tidak akurat.

Dengan beberapa penjelasan tersebut, kesenjangannya jelas. Tidak ada indeks yang saat ini secara khusus mengukur *proximity* relasional terhadap kutub-kutub kekuatan yang sedang bersaing. Metrik yang ada terfragmentasi berdasarkan domain yang cenderung *cherry-picking*. Selain itu, selama ini penelitian tentang *proximity* dalam Ilmu Hubungan Internasional masih cenderung kualitatif; kaya akan narasi tetapi lemah untuk diperbandingkan dan tidak menggunakan pengukuran yang pasti (Weed 2023). Jika *proximity index* yang baik dapat dibangun, ia dapat menyediakan metode yang transparan dan dapat direplikasi, misalnya dengan menggabungkan aspek ekonomi, militer, dan diplomatik. Dalam penelitian ini, ia dapat menghasilkan skor relatif pada spektrum AS-Cina (dan juga dapat diterapkan pada studi kasus/negara lain).

Metodologi

Proximity Index (PI) dirancang untuk mengukur seberapa dekat suatu negara (dalam hal ini Indonesia) dengan dua kekuatan global yang bersaing. PI mengadopsi pola *composite index* yang umum dipakai di berbagai studi. Dalam penelitian ini, *proximity* dipahami sebagai derajat orientasi kebijakan bilateral Indonesia terhadap kekuatan besar. Ia dioperasionalkan/diukur melalui tiga domain utama: ekonomi, militer, dan diplomasi. Dimensi ekonomi mencakup nilai perdagangan dan FDI.

Aspek ini mencerminkan keterikatan material sejalan dengan premis liberalisme: bahwa interdependensi ekonomi menjadi fondasi hubungan antarnegara (Cooper, 1985; Keohane, 1989). Dimensi militer diukur melalui transfer persenjataan dan kerja sama pertahanan. ia merepresentasikan kalkulasi strategis sebagaimana ditekankan realisme, bahwa distribusi *power* menentukan arah suatu hubungan (Jervis, 1988; Morgenthau, 1973). Sementara itu, dimensi diplomasi, yang diukur melalui intensitas interaksi/kunjungan tingkat tinggi (Der Derian, 1987). Dengan demikian, PI diperlakukan sebagai indeks komposit multi-aspek.

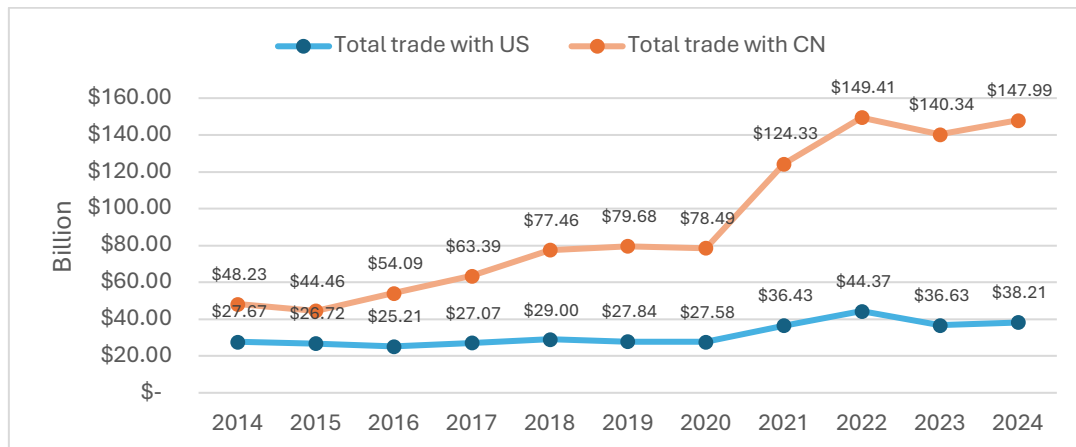
PI ini bersifat diadik (melibatkan dua pihak) dan terstruktur per domain. Unit analisisnya adalah negara-dyad-tahun. Kami menguji dengan studi kasus Indonesia di tengah persaingan AS-Cina Untuk mengukurnya. Ketiga aspek sebagaimana disebut di atas digabungkan menjadi satu skor yang menunjukkan seberapa dekat Indonesia dengan salah satu *super power*.

Data yang dipakai adalah per negara-tahun. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti:

- Ekonomi: nilai perdagangan barang dengan AS dan Cina; FDI dari/ke AS dan Cina (sumbernya dari IMF, UNComtrade, BPS)
- Militer: impor senjata dari AS dan Cina; jumlah latihan/pendidikan militer Bersama (SIPRI, News articles/The Diplomat)
- Diplomasi: jumlah kunjungan tingkat tinggi; jumlah pernyataan/komunike Bersama (Kementerian Luar Negeri RI, UN Digital Library, dan News articles/The Diplomat)

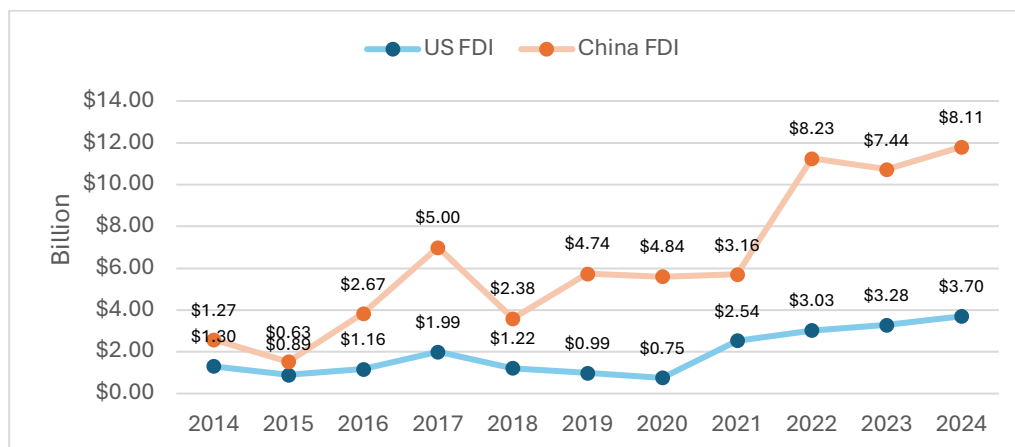
Data yang telah didapat bisa dilihat pada beberapa grafik dan tabel berikut:

Gambar 1. Total Perdagangan Indonesia dengan AS dan Cina



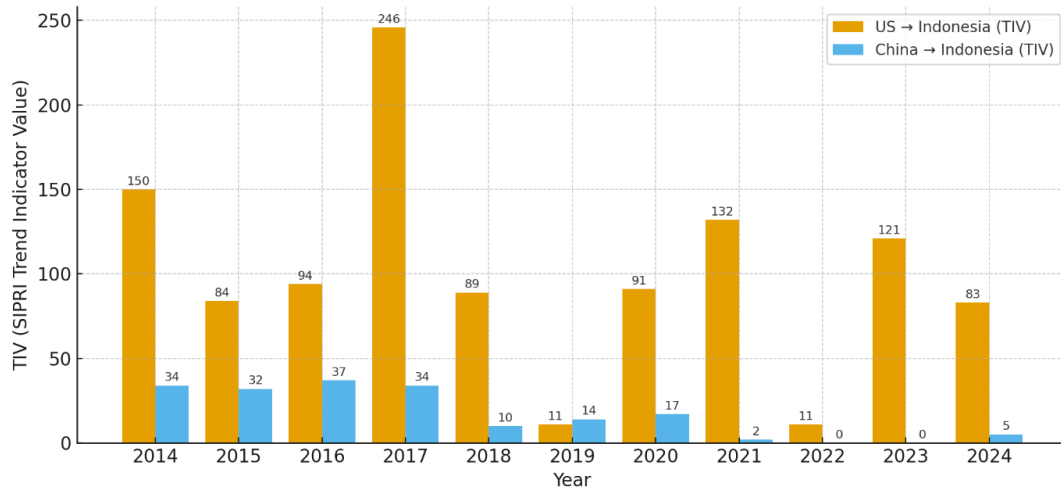
Perdagangan Indonesia dengan Cina konsisten melampaui perdagangan dengan AS. Dari tahun 2014 hingga 2024, perdagangan Indonesia dengan Cina terus meningkat. Nilai total perdagangan mencapai \$147,98 miliar pada tahun 2024. Sebaliknya, perdagangan dengan AS berfluktuasi sedang. Namun trennya meningkat, yang mencapai \$38,21 miliar pada tahun 2024.

Gambar 2. Total Investasi AS dan Cina di Indonesia



Sementara itu, arus masuk modal (*FDI in-flows*) dari Cina ke Indonesia naik secara konsisten. Angkanya mencapai \$8,11 miliar pada tahun 2024, naik dari \$1,27 miliar pada tahun 2014. Sebagai perbandingan, FDI inflows AS ke Indonesia berfluktuasi dan mencapai puncaknya pada \$3,69 miliar pada tahun 2024. Nilainya jauh dari Cina.

Gambar 3. Total Transfer Senjata dari AS dan Cina ke Indonesia



Transfer senjata dari AS ke Indonesia secara konsisten lebih tinggi dari Cina. Pada tahun 2014, AS mentransfer 150 juta TIV.² Nilai terbesar pada tahun 2017 dengan total 246 juta TIV. Sebaliknya, transfer senjata Cina jauh lebih rendah. Dimulai dari 34 juta TIV pada tahun 2014 dan berfluktuasi selama bertahun-tahun. Sempat tidak ada transfer senjata yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023,³ dan hanya 5 juta TIV pada tahun 2024.

Tabel 1. Jumlah Latihan Militer Indonesia - AS

Tahun	Jumlah	Catatan
2014	1	Garuda Shield 2014 (bilateral tahunan).
2015	1	Garuda Shield (latihan tahunan berlanjut).
2016	1	Garuda Shield (tahunan).
2017	1	Garuda Shield (tahunan).
2018	1	Garuda Shield (tahunan).
2019	1	Garuda Shield 19 (pembukaan & penutupan terdokumentasi).
2020	0	Tidak ada latihan
2021	1	Garuda Shield 2021 (edisi pascapandemi).
2022	1	Super Garuda Shield 2022 (ekspansi multinasional, tetap dipimpin RI-AS).
2023	2	Super Garuda Shield 2023; & Cope West 23 (AU RI-AS).
2024	3	Super Garuda Shield 2024; CARAT Indonesia 2024 (maritim); & Cope West 24 (AU).

² Diukur dalam SIPRI Trend-Indicator Values (TIV), sebuah sistem unit yang digunakan oleh SIPRI untuk mengukur volume transfer senjata.

³ Angka '0' menunjukkan volume pengiriman antara 0 dan 0,5 juta TIV.

Tabel 2. Jumlah Latihan Militer Indonesia - Cina

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Catatan</i>
2014	1	Latihan tahunan TNI-AD – PLA “Sharp Knife” counterterrorism
2015	0	Tidak ada latihan bilateral
2016	0	Tidak ada latihan bilateral
2017	0	Tidak ada latihan bilateral
2018	0	Tidak ada latihan bilateral
2019	0	Tidak ada latihan bilateral
2020	0	Tidak ada latihan bilateral
2021	1	Latihan laut bersama dekat Jakarta (komunikasi, SAR, manuver formasi)
2022	0	Tidak ada latihan bilateral (Cina ikut bantu pencarian KRI Nanggala 2021 & ada banyak latihan multilateral, tapi bukan bilateral).
2023	0	Tidak ada latihan bilateral; ASEAN Solidarity Exercise (ASEX-01N) adalah multilateral.
2024	1	“Peace/Heping Garuda-2024” latihan bersama HADR (HADR joint exercise) di RI (Nov–Des).

Hubungan pertahanan Indonesia–Cina menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Latihan militer bilateral pertama kali terealisasi dalam bentuk latihan kontra-terorisme “*Sharp Knife*” pada 2011–2014. Program ini melibatkan TNI-AD dan *China’s People’s Liberation Army* (PLA). Namun, kerjasama ini terhenti sejak 2015 karena adanya ketegangan di Laut Natuna Utara. Klaim sepihak Cina dengan *nine/ten-dash line* tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Hal ini memicu insiden penangkapan kapal ikan Cina oleh aparat Indonesia.⁴ Ketegangan ini menimbulkan gesekan diplomatik sehingga kerja sama pertahanan, termasuk latihan bersama, dihentikan (Wei, 2024).

Selama beberapa tahun berikutnya (2015–2020), tidak ada catatan latihan bilateral langsung, meskipun Cina tetap berpartisipasi dalam latihan multilateral yang diselenggarakan Indonesia seperti Multilateral Naval Exercise Komodo. Pada 2021 kembali tercatat adanya latihan laut bersama,

⁴ Selain itu, penenggelaman kapal oleh Menteri Susi (2014–2019) memperburuk ketegangan kedua negara. Meski ini bukan dampak langsung, ia telah memperkesuh hubungan dan meningkat atmosfer ketidakpercayaan antara Jakarta dan Beijing (Parameswaran, 2016).

tetapi dua tahun berikutnya tidak ditemukan bukti latihan bilateral yang signifikan. Pada 2024, melalui dialog pertahanan bersama, Indonesia dan Cina menyepakati untuk melanjutkan kembali latihan militer dengan agenda “Peace/Heping Garuda-2024.”

Tabel 3. Jumlah Kunjungan Diplomatik Tingkat Tinggi Indonesia-AS

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Keterangan</i>
2014	1	Menteri Luar Negeri AS John Kerry di Jakarta.
2015	1	Kunjungan Presiden Jokowi ke Washington, Gedung Putih.
2016	0	Tidak ada kunjungan
2017	1	Wakil Presiden AS Mike Pence di Jakarta.
2018	1	Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Jakarta.
2019	0	Tidak ada kunjungan
2020	1	Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Jakarta (Okt).
2021	2	Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Jakarta (Des); Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Washington untuk Dialog Strategis (Agus).
2022	0	Tidak ada kunjungan
2023	2	Menteri Luar Negeri AS Blinken di Jakarta (Juli, ASEAN & bilateral); Kunjungan resmi Presiden Jokowi ke Washington, Gedung Putih (Nov).
2024	1	Presiden Prabowo ke Washington, Gedung Putih (Nov)

Tabel 4. Jumlah Kunjungan Diplomatik Tingkat Tinggi Indonesia-Cina

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Keterangan</i>
2014	0	Tidak ada kunjungan
2015	0	Tidak ada kunjungan
2016	0	Tidak ada kunjungan
2017	0	Tidak ada kunjungan
2018	1	Kunjungan Perdana Menteri Li Keqiang ke Indonesia (Mei).
2019	0	Tidak ada kunjungan
2020	0	Tidak ada kunjungan (pandemi)
2021	1	Kunjungan Menlu Cina Wang Yi ke Jakarta (Jan).
2022	3	Menlu Wang Yi di Bali (Juli, bilateral dengan Menlu Retno); Presiden Xi Jinping bilateral dengan Presiden Jokowi di Bali (Nov, G20); & Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Beijing (Jul).

2023	1	Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang ke Jakarta selama ASEAN (Sep).
2024	2	Kunjungan resmi Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Beijing (2 April); & Menlu Wang Yi Jakarta (April).

Data kunjungan diplomatik tingkat tinggi menunjukkan beberapa tren. Dari tahun 2014 hingga 2024, AS telah melakukan beberapa kunjungan penting ke Indonesia. Yang paling menonjol adalah kunjungan Menteri Luar Negeri AS, seperti John Kerry (2014), Mike Pompeo (2018, 2019), dan Antony Blinken (2021, 2023). Sebaliknya, Presiden Jokowi dan Prabowo juga berkunjung balik ke US. Di lain sisi, kunjungan diplomatik Cina ke Indonesia menunjukkan konsistensi yang lebih rendah. Namun, trennya justru semakin meningkat, terutama sejak tahun 2017. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengunjungi Indonesia, dan pada tahun 2021, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengunjungi Jakarta. Hal ini juga dibalas dengan kunjungan balik ke Cina. Kedua negara menunjukkan keterlibatan diplomatik yang aktif. Namun, AS mempertahankan frekuensi kunjungan yang sedikit lebih tinggi selama periode tersebut.

Konstruksi Proximity Indeks

Setelah dikumpulkan, data tersebut dinormalisasi untuk memastikan keseragaman skala sebelum dikonstruksi menjadi sebuah indeks komposit yang kami namai dengan Indonesia Proximity Index. Tujuannya adalah memberi skor 0–1 yang menunjukkan Indonesia lebih dekat ke AS (mendekati 1) atau Cina (mendekati 0) pada tiap tahun.

Indeks ini akan dikalkulasi dalam dua pemisahan diadik. Untuk setiap indikator i , pada tahun t , ia akan dihitung dengan diadik terpisah sehingga arahnya intrinsik. Misalnya, kedekatan perdagangan dengan AS dihitung dengan:

$$\frac{x_{US,i,t}}{x_{US,i,t} + x_{USi,t}}$$

Teknik Perhitungan

Pertama, jadikan “share” untuk tiap indikator. Ambil pasangan angka AS vs Cina lalu ubah jadi proporsi ke AS. Rumus umumnya adalah:

$$Share_{US,i,t} = \frac{x_{US,i,t}}{x_{US,i} + x_{CN,i}}$$

$$Share_{CN,i,t} = 1 - Share_{US,i,t}$$

Perhitungan seperti ini riskan terhadap error, seperti misalnya nilai 0 pada satu aspek pada satu waktu tertentu (terutama pada data diplomasi dan militer). Sebuah angka tentu tidak bisa dibagi dengan 0. Untuk mengatasi error ini, angka 0 akan diganti dengan nilai konstanta kecil 0.01 dengan asumsi nilai ini memiliki dampak analisis yang minimal.

Kedua, rata-ratakan semua $Share_{US}$ pada setiap aspek:

$$S_{Eko,US,t} = rata2 \{Share_{US,perdagangan,t}, Share_{US,FDI,t}, \dots\}$$

Lakukan hal yang sama untuk Militer dan Diplomasi sehingga akan didapat $S_{Mil,US,t}$ dan $S_{Dip,US,t}$.

Ketiga, gabungkan tiga aspek tersebut. Ambil rata-rata tiga aspek (bobot sama), sehingga didapat:

$$S_{us,t} = \frac{S_{Eko,US,t} + S_{Mil,US,t} + S_{Dip,US,t}}{3}$$

Karena semua berbasis ‘share’, maka $S_{CN,t} = 1 - S_{US,t}$

Keempat, skor akhir Indonesia *Proximity Index* (PI) dihitung sebagai $PI_t = S_{US,t}$. Sehingga:

$$PI_t = S_{us} = \frac{S_{Eko,US,t} + S_{Mil,US,t} + S_{Dip,US,t}}{3} \in [0,1]$$

Cara menilainya adalah, jika:

$PI > 0,5$ --> maka Indonesia lebih dekat ke AS

$PI < 0,5$ --> maka Indonesia lebih dekat ke Cina.

Sekitar 0,5 --> maka seimbang (*hedging*)

Kemudian, peramalan untuk tahun 2025-2029 dimulai dengan menerapkan regresi linier pada data historis (2014-2024) untuk masing-masing dari tiga variabel. Proses ini menghasilkan tren linier tentang bagaimana setiap skor berubah seiring waktu. Ini kemudian digunakan untuk ekstrapolasi, memprediksi nilai-nilai skor ekonomi, militer, dan diplomasi di masa mendatang. Prediksi skor rata-rata kemudian dihitung untuk setiap tahun mendatang menggunakan rumus regresi OLS (Ordinary Least Squares) terpisah berdasarkan koefisien yang diperoleh sebelumnya. Rumusnya adalah:

$$Pred_PI = constant + (coef_{eco} \times eco_score) + (coef_{mil} \times mi_score) + (coef_{dip} \times dip_score)$$

Rumus ini menggabungkan skor individual yang baru diprediksi dengan koefisiennya masing-masing dan konstanta model untuk menghasilkan skor rata-rata akhir yang diprediksi. Hasilnya adalah tabel kompilasi yang menunjukkan keempat skor yang diprediksi setiap tahunnya. Tentu, prediksi ini didasarkan pada asumsi bahwa tren historis akan berlanjut secara statistik.

PEMBAHASAN

Analisis Proximity Indeks

PI atau indeks kedekatan ini dihitung untuk mengukur kedekatan relatif Indonesia dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan Cina dari tahun 2014 hingga 2024.⁵ Indeks ini mengukur rata-rata tiga aspek (ekonomi, militer, dan diplomasi) yang masing-masing dibangun dari *share value* AS/(AS+Cina). Sebagaimana disebutkan, nilai di atas 0,5 menunjukkan proximity ke Amerika Serikat, sedangkan di bawah 0,5 proximity ke Cina. Hasil perhitungan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 5.** dan **Gambar 4.**

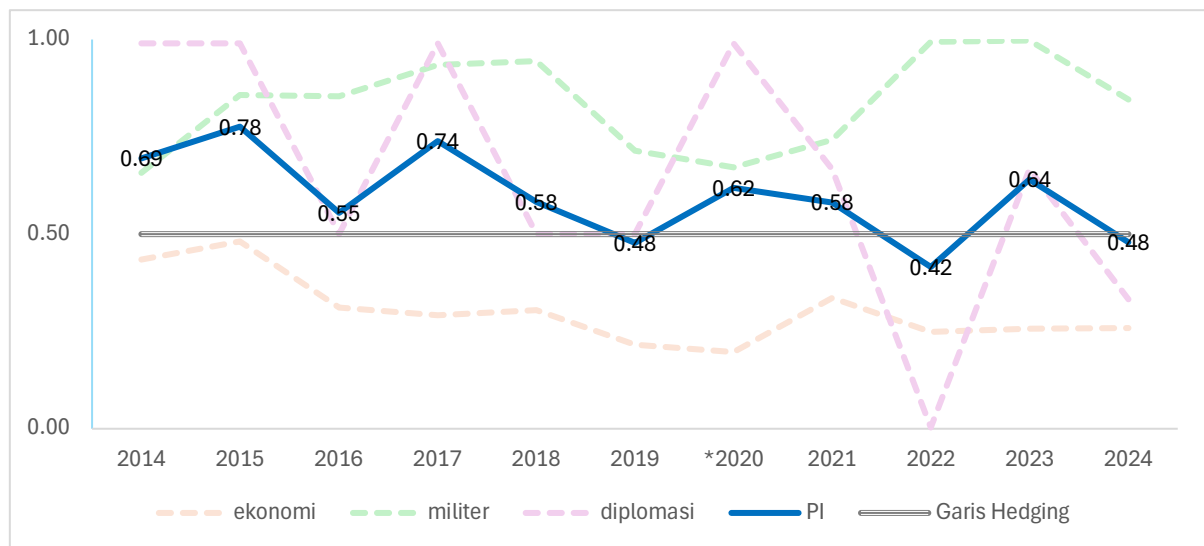
⁵ Pemilihan tahun ini didasarkan pada ketersediaan data yang terbatas. Setidaknya, tahun 2020 menjadi 'titik utama' untuk menilai dan membandingkan dinamika sebelum dan sesudah Covid-19.

Tabel 5. Indonesia *Proximity Index* (AS vs Cina) 2014-2024

<i>tahun</i>	<i>eco_score</i>	<i>mil_score</i>	<i>dip_score</i>	<i>PI</i>
2014	0.43	0.66	0.99	0.69
2015	0.48	0.86	0.99	0.78
2016	0.31	0.85	0.50	0.55
2017	0.29	0.93	0.99	0.74
2018	0.31	0.94	0.50	0.58
2019	0.22	0.72	0.50	0.48
*2020	0.20	0.67	0.99	0.62
2021	0.34	0.74	0.67	0.58
2022	0.25	0.99	0.00	0.41
2023	0.26	1.00	0.67	0.64
2024	0.26	0.85	0.33	0.48

Keterangan: perhitungan dengan Python matplotlib. *Pandemi Covid-19.

Gambar 4. Indonesia *Proximity Index* (AS vs Cina) 2014-2024



Keterangan: perhitungan dengan Python matplotlib.

Sebagai periode awal perhitungan, Tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia lebih dekat dengan AS. IP berada pada 0.69 di tahun 2014 dan 0,78 pada tahun 2015. Hal ini diperkuat oleh aspek militer dan diplomasi. Aspek ekonomi pada tahun 2014 telah menunjukkan proximity ke Cina.

Setelah itu, nilai PI mengalami fluktuasi, dengan tren ke arah menurun. Hal ini karena aspek ekonomi mulai semakin bergeser ke Cina. Tahun 2019 Indonesia sempat terlihat seimbang/hedging (0,48). Hal ini terjadi di mana ekonomi dekat dengan Cina, sementara militer dekat dengan AS. Dua aspek ini menyeimbangkan angka PI.

Titik terendah kedekatan dengan AS terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 0,42. Ini menjadi tahun pertama di mana Indonesia menunjukkan kecenderungan mendekat ke Cina. Pada tahun ini ekonomi Indonesia lebih dekat dengan Cina. Meski hubungan sangat tinggi ke AS, namun tidak tercatat adanya kunjungan tingkat tinggi dengan AS, sementara tercatat adanya tiga kali kunjungan Indonesia-Cina. Kedekatan dengan AS sempat pulih pada tahun 2023 menjadi 0,64. Namun, tahun berikutnya, terjadi penurunan kembali menjadi posisi seimbang di 0,48. Dari sebelas tahun tersebut, Indonesia secara umum telah menunjukkan kedekatan dengan AS ($>0,55$), dengan hanya satu kali lebih dengan Cina ($<0,45$), dan dua waktu mendekati posisi netral (2019 & 2024).

Pola pada setiap aspek menjelaskan pergerakan indeks secara keseluruhan. Pertama, aspek militer secara konsisten memiliki nilai tinggi yang mendukung AS (rata-rata 0,84). Hal ini dipengaruhi oleh faktor pengiriman senjata dari dan latihan militer bersama dengan AS. Selama ini, Indonesia memang lebih banyak membeli peralatan militer dari AS. Latihan militer *Garuda Shield* dan *Super Garuda Shield* juga sudah menjadi agenda tahunan yang melibatkan kedua negara. Aspek militer ini berfungsi sebagai dasar positif di hampir setiap tahun. Namun, perlu dicatat, pergerakannya tidak terlalu signifikan sehingga kurang menjelaskan variasi indeks secara keseluruhan.

Kedua, aspek ekonomi selalu bernilai rendah (rata-rata 0,30). Ini mencerminkan bahwa berdasarkan ukuran perdagangan dan aliran investasi (FDI inflow), Indonesia cenderung lebih dekat dengan Cina. Aspek ini menjadi penyeimbang yang stabil bagi aspek militer.

Ketiga, aspek diplomasi adalah komponen yang mungkin paling banyak memengaruhi perubahan nilai indeks. Rata-ratanya adalah 0,65. Namun nilainya berfluktuasi secara tajam dari tahun ke tahun: proximity dengan AS pada 2014–2015 (skor 0,99), netral pada 2018 (0,50), bergeser tajam ke Cina pada 2022 (0,00), kemudian pulih sebagian pada 2023 (0,67), dan kembali turun ke 0,33 pada 2024. Korelasi ini terlihat jelas: IP paling berkorelasi dengan diplomasi ($r \approx 0,97$), diikuti ekonomi ($r \approx 0,56$), sementara militer menunjukkan korelasi yang lebih lemah ($r \approx 0,16$) karena nilainya yang tinggi dan stabil.

Ada tiga titik balik penting dan menonjol yang perlu menjadi catatan. Pertama, tahun 2019. Indeks turun di bawah 0,5 saat aspek ekonomi semakin mengarah ke Cina. Meskipun aspek militer masih tinggi, diplomasi tidak memberikan penyeimbang (sinyal netral). Kedua dan ketiga, masing-masing di tahun 2022 dan 2024. Terjadi penurunan tahunan terbesar ($\Delta IP \approx -0,16$), meskipun aspek militer tetap tinggi (0,99 & 0,85). Penurunan ini disebabkan oleh aspek diplomasi yang nilainya rendah. Pada kedua tahun tersebut, Indonesia-Cina lebih banyak melakukan kunjungan diplomatik dari pada dengan AS. hal ini dikombinasikan dengan aspek ekonomi yang tetap mengarah ke Cina. Singkatnya, indeks berfluktuasi tajam ketika sinyal diplomatik berubah, ekonomi berperan sebagai penahan, dan militer menjadi jangkar yang menopang kedekatan dengan AS (meskipun tidak selalu mampu mengimbangi dua aspek lainnya).

Secara umum, interpretasi dari data ini adalah, hubungan pertahanan struktural Indonesia dengan AS tetap kuat. Sementara, hubungan ekonomi Indonesia lebih terikat pada Cina dan menjadi jangkar dalam jangka panjang. Perilaku diplomasi berfungsi sebagai pendorong utama perubahan kedekatan. Ini yang bisa disebut sebagai dimensi tak terduga dari proximity. Hasil tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa aktivitas diplomasi berpihak pada Cina, ekonomi tetap condong ke Cina, dan aspek militer hanya mampu sedikit menyeimbangkan indeks.

Prediksi *Proximity* Indonesia

Prediksi kedekatan Indonesia dengan AS dan Cina dari tahun 2025 hingga 2029 dihitung berdasarkan tren dari ketiga aspek. Analisis regresi terhadap tren ini dilakukan menggunakan OLS. Ketiga variabel tersebut dimodelkan sebagai prediktor independen. Koefisien untuk setiap prediktor diestimasi untuk mengukur pengaruhnya terhadap skor rata-rata PI. Hasil regresi dapat dilihat pada **Tabel 6.** di bawah. Secara statistik semua variabel signifikan, dengan nilai-p yang rendah.

Tabel 6. Regresi OLS Prediktor

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>P-value</i>	<i>95% Confidence Interval</i>
<i>Constant</i>	-0.0064	0.011	-0.570	0.587	[-0.033, 0.020]
<i>econ_score</i>	0.3323	0.016	20.407	0.000	[0.294, 0.371]
<i>mil_score</i>	0.3416	0.011	30.172	0.000	[0.315, 0.368]
<i>dip_score</i>	0.3326	0.005	69.804	0.000	[0.321, 0.344]
R-squared:	0.999			F-statistic:	2733
Adjusted:	0.999			p-value:	4.22e-11

*Keterangan: perhitungan dengan Python matplotlib. *Pandemi Covid-19.*

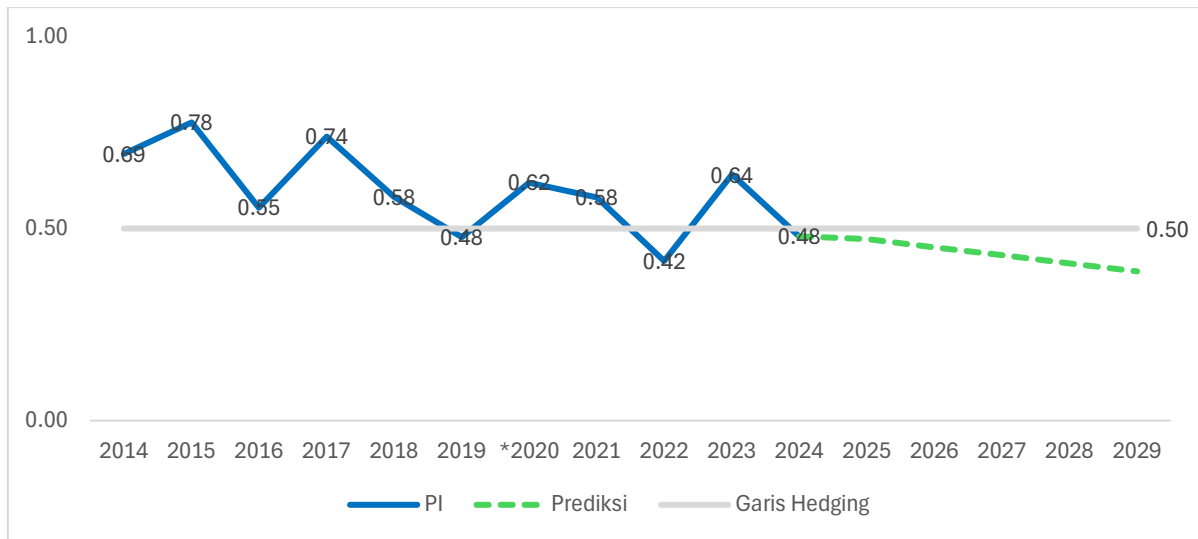
Dengan analisis regresi tersebut, diperoleh prediksi statistik seperti berikut:

Tabel 7. Prediksi Indonesia *Proximity Index* (AS vs Cina) 2025-2029

<i>tahun</i>	<i>eco_score</i>	<i>mil_score</i>	<i>dip_score</i>	<i>PI</i>
2025	0.20	0.91	0.31	0.47
2026	0.18	0.92	0.25	0.45
2027	0.16	0.93	0.20	0.43
2028	0.15	0.94	0.14	0.41
2029	0.13	0.95	0.08	0.39

*Keterangan: perhitungan dengan Python matplotlib. *Pandemi Covid-19.*

Gambar 5. Grafik Prediksi



*Keterangan: perhitungan dengan Python matplotlib. *Pandemi Covid-19.*

Hasil regresi menunjukkan adanya pergeseran *proximity* ke Cina. Skor ekonomi diperkirakan akan terus menurun yang mengindikasikan penurunan ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap AS. Tren ini mungkin sejalan dengan meningkatnya pengaruh ekonomi Cina di kawasan, terutama berkaitan dengan proyek *Belt and Road Initiative*.

Di bidang militer, skor militer Indonesia diprediksi akan relatif stabil, dengan sedikit peningkatan. Latihan militer dan transfer senjata tercermin di sini. Namun, meningkatnya diversifikasi kemitraan militer, seperti pengaruh Cina yang semakin besar di kawasan, dapat memoderasi *proximity* tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk mempertahankan prinsip luar negeri "bebas dan aktif" dengan menyeimbangkan antara kedua kekuatan.

Skor diplomatik secara statistik diproyeksikan mengalami penurunan, terutama pada tahun-tahun menjelang 2029. Ini menunjukkan penurunan keterlibatan diplomatik Indonesia dengan AS dan Cina di tahun-tahun mendatang. Potensi yang menjadi penyebab adalah perubahan dinamika politik global, prioritas domestik, atau pergeseran kebijakan luar negeri yang lebih multilateral.

Namun, penting untuk dicatat bahwa prediksi ini sifatnya statistik. Model ini mengasumsikan bahwa tren saat ini akan terus berlanjut yang

didasarkan pada data yang sudah ada sebelumnya (*historical data*). Peristiwa geopolitik di masa mendatang, pergeseran kebijakan domestik, atau krisis internasional yang tak terduga tentu dapat menyebabkan perubahan PI yang signifikan. Artinya, prediksi tersebut sangat bergantung pada dinamika global yang terus berkembang. Meskipun model ini memberikan wawasan berdasarkan data historis, ia tidak memperhitungkan potensi pergeseran tatanan internasional yang dapat mengubah kepentingan strategis Indonesia, AS, atau Cina. Sehingga meskipun prediksi itu menawarkan perspektif statistik, ia harus ditafsirkan secara hati-hati.

Tren Kebijakan Luar Negeri: Dampak Pandemi, G20, dan Transisi Kepemimpinan

Pandemi COVID-19 diperkirakan telah mengubah kebijakan luar negeri negara-negara secara drastis. Termasuk juga pada arah kebijakan luar negeri Indonesia dengan AS dan Cina. Namun, jika melihat statistik dalam penelitian ini, data menunjukkan bahwa pandemi tidak secara signifikan mengganggu proximity Indonesia dengan Cina dan AS. Hal ini berbeda dengan yang diperkirakan oleh para peneliti. Dalam konteks statistik ini, IP yang naik dari 0,47 pada tahun 2019 menjadi 0,68 pada tahun 2020, menunjukkan pergeseran sementara yang dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi Cina. Meskipun terjadi gangguan perdagangan global, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina menguat, terutama dalam ekspor mineral dan produk pertanian.

Sementara itu, fokus AS pada investasi teknologi dan manufaktur tetap stabil. Namun ia tidak secara drastis mengubah proximity ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktural akibat pandemi tidak begitu berdampak pada tahun-tahun berikutnya bagi Indonesia. Hal ini karena kebijakan luar negeri dan proximity ekonomi Indonesia dengan kedua kekuatan tersebut sebagian besar tetap tidak berubah.

Secara diplomatik, tahun 2020 menyaksikan peningkatan yang tidak biasa dalam keterlibatan diplomatik Indonesia, terutama melalui diplomasi vaksin (Yuliantoro, 2022). Meskipun pembatasan perjalanan global

membatasi kunjungan tingkat tinggi, penyediaan vaksin Sinovac dari Cina memberikan pengaruh dalam hubungan diplomatik (Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary, 2021). Di sisi lain, kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Jakarta menggarisbawahi minat AS terhadap Indonesia. Pandemi tidak mengubah arah hubungan luar negeri Indonesia secara radikal. Artinya, Indonesia mempertahankan pendekatan yang stabil untuk menyeimbangkan hubungannya dengan AS dan Cina (Lee, 2023; Zubair et al., 2023).

Kepresidenan G20 tahun 2022, ditambah dengan perang di Ukraina, barangkali menandai titik balik dalam kebijakan luar negeri Indonesia. PI turun tajam menjadi 0,42, terutama karena faktor diplomasi. Memang, selama ini, diplomasi bolak-balik Presiden Jokowi—mengunjungi Kiev, Moskow, Beijing, dan Washington—menunjukkan komitmen Indonesia terhadap netralitas dan keseimbangan. Namun tidak dilakukan pada tahun yang sama. Diplomasi Indonesia memang lebih condong ke Cina di tahun 2023, ditandai dengan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Bali untuk menghadiri KTT G20 (Kassim, 2023; Pitsuwan, 2022). Sementara itu, skor ekonomi turun menjadi 0,25-0,26, yang mencerminkan semakin eratnya hubungan dengan Timur.

Pada tahun 2024, terjadi pergeseran dramatis dalam Indeks Proximity Indonesia. Indeks turun menjadi 0,48 seiring dengan terjadinya transisi kepemimpinan. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden menandai kalibrasi ulang kebijakan luar negeri Indonesia. Kunjungan pra-pelantikannya ke Beijing menandakan pergeseran diplomatik yang kuat ke Cina (Surianta, 2024). Namun, hal ini juga diimbangi dengan kunjungan Prabowo ke Gedung Putih di tahun yang sama. Indonesia menjaga keselarasan yang lebih erat dengan Cina, terutama dalam hal ekonomi. Indonesia semakin bergantung pada perdagangan dan investasi Cina. Lambatnya keterlibatan ekonomi dengan AS pada tahun 2024 semakin memperkuat tren ini. Hilirisasi mineral dan pertumbuhan industri kendaraan listrik (EV) merupakan contoh indikator integrasi ekonomi ke

Cina, terutama melalui proyek BRI (Ghossein et al., 2021; Pasaribu et al., 2025).

Hubungan pertahanan dengan AS kuat dan skor militer tetap tinggi. Ini mencerminkan kolaborasi yang berkelanjutan melalui inisiatif seperti latihan Super Garuda Shield. Namun, hubungan militer Indonesia dengan Cina menunjukkan tanda-tanda diversifikasi. Hal ini terutama ditunjukkan dengan latihan bersama seperti Peace Garuda-2024, yang menandakan pergeseran halus dalam kerja sama pertahanan.

Krisis global seperti pandemi dan perang Ukraina memang telah menimbulkan ekspektasi akan adanya pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri. Namun, dalam statistik proximity Indonesia, kebijakan luar negeri relatif seimbang. Terlepas dari transisi domestik dan tantangan geopolitik, Indonesia mempertahankan fleksibilitas dalam hubungannya dengan AS dan Cina. Masa depan tetap tidak dapat diprediksi secara pasti. Namun, tren menunjukkan adanya keselarasan arah kebijakan luar negeri kepada Cina, terutama dalam aspek ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mencoba mengembangkan Indonesia *Proximity* Indeks (PI) untuk mengukur arah atau *positioning* Indonesia di tengah persaingan AS dan Cina. Indeks dihitung dengan *range* 1-0. Jika naik atau mendekati 1, maka Indonesia dekat dengan AS. sebaliknya jika turun mendekati 0, maka indeks menunjukkan Indonesia dekat dengan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keamanan secara kuat berlabuh pada AS, sementara hubungan ekonomi cenderung pada Cina. Berbeda dengan pendapat umum, studi ini berpendapat bahwa berbagai guncangan global—seperti pemulihan pasca-pandemi—tidak banyak berpengaruh pada kebijakan luar negeri Indonesia, yang memang sejak awal berprinsip pada 'bebas-aktif'. Meski militer tetap dekat dengan AS, ekonomi Indonesia lebih condong ke Cina. Pola ekonomi terhadap Cina juga semakin menguat secara perlahan. Meski demikian, penurunan indeks pada tahun 2024, khususnya, lebih dapat dimaknai sebagai perubahan 'komposisi' (pergeseran bobot),

bukan '*realignment*' (perubahan haluan). Sinyal diplomasi pro-AS memang melemah sementara hubungan ekonomi dengan Cina tetap dominan.

Proximity Indeks ini murni bersifat statistik. Ia lebih tepat disebut sebagai 'audit trail' atau jejak rekam yang dapat dilacak dan direplika. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi domain mana yang paling memengaruhi pergerakan kedekatan Indonesia di tahun tertentu. Implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah bahwa Indonesia dapat mempertahankan otonomi strategisnya selama kedua kutub struktural (hubungan dengan AS dan Cina) tetap kredibel. Pembuat kebijakan dapat menggunakan indeks ini sebagai *dashboard* untuk memantau bagaimana guncangan global memengaruhi atau justru tidak berdampak pada posisi Indonesia.

Ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Analisis dalam studi ini mengasumsikan sebuah negara yang berada pada situasi persaingan dua kekuatan utama. Lebih dari itu, model ini mungkin tidak berlaku atau perlu dimodifikasi. Selain itu, analisis ini menggunakan aliran FDI sebagai salah satu aspek ekonomi. FDI ini dapat disempurnakan dengan posisi *FDI stock* karena cenderung lebih stabil. Sayangnya data yang demikian tidak cukup tersedia. Kemudian, aspek diplomasi didasarkan hanya pada kunjungan tingkat tinggi. Aspek sebenarnya dapat diperkaya dengan data voting di Majelis Umum PBB. Namun lagi-lagi, datanya cukup kompleks untuk dijadikan rujukan. Setidaknya, perhitungan PI ini mengkonfirmasi kompleksitas *positioning* strategis Indonesia di tengah persaingan AS-Cina. Jika memang Indonesia sebagai negara kekuatan menengah ingin dekat dengan Cina ataupun dengan AS, pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan aspek mana yang perlu didorong. Tentu dengan memperhatikan peluang dalam perkembangan politik global yang serba dinamis.

Keterangan

Penelitian ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. No. kontrak 127/C3/DT.04.00/PL/2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316756768>
- Alfian, M. F., Hudaya, M., Anggraheni, P., & Zuliyani, M. A. (2025). TECHNOLOGY AS AN INSTRUMENT IN GREAT POWER POLITICS: AN OVERVIEW OF THE US-CHINA TECH WAR. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 10(1), 73-99. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v10i1.3709>
- Alhammadi, A. (2022). The neorealism and neoliberalism behind international relations during covid-19. *World Affairs*, 185(1), 147–175. <https://doi.org/10.1177/00438200211065128>
- Ali, P. M. (2020). The Effects of Coronavirus on Global Relations and Strategy Making in International Arena. *Eurasian Journal of Management & Social Sciences*, 1(4), 33–38. <https://doi.org/10.23918/ejmss.v1i4p33>
- Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US-China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review*, 36(2), 351–377. <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794>
- Bailey, M. A., Strezhnev, A., & Voeten, E. (2017). Estimating Dynamic State Preferences from United Nations Voting Data. *The Journal of Conflict Resolution*, 61(2), 430–456.
- Bapat, N. (2020). Will COVID-19 Cause a War? Understanding the Case of the U.S. and China. *PEACE ECONOMICS PEACE SCIENCE AND PUBLIC POLICY*, 26(3). <https://doi.org/10.1515/peps-2020-0047>
- Botero, G. (1589). *The Reason of State*.
- Boylan, B. M., McBeath, J., & Wang, B. (2021). US-China Relations: Nationalism, the Trade War, and COVID-19. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 14(1), 23–40. <https://doi.org/10.1007/s40647-020-00302-6>
- Cooper, R. N. (1985). Economic interdependence and coordination of economic policies. In *Handbook of international economics* (pp. 1195–1234). Elsevier BV. [https://doi.org/10.1016/s1573-4404\(85\)02014-7](https://doi.org/10.1016/s1573-4404(85)02014-7)
- Der Derian, J. (with Internet Archive). (1987). *On diplomacy: A genealogy of Western estrangement*. Oxford, OX, UK; New York, NY, USA: B. Blackwell. <http://archive.org/details/ondiplomacygenea0000derd>

- Ferreira, I. A. (2017). Measuring state fragility: A review of the theoretical groundings of existing approaches. *Third World Quarterly*, 38(6), 1291–1309. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1257907>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- García-Herrero, A., Storella, T., & Weil, P. (2025, September 16). China's influence at the United Nations: Words and deeds. *Working Paper 19/2024, Bruegel*. <https://www.bruegel.org/working-paper/chinas-influence-united-nations-words-and-deeds>
- Ghossein, T., Hoekman, B., & Shingal, A. (2021). Public Procurement, Regional Integration, and the Belt and Road Initiative. *The World Bank Research Observer*, 36(2), 131–163. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkab004>
- Goldstein, J. S. (1992). A Conflict-Cooperation Scale for WEIS Events Data. *The Journal of Conflict Resolution*, 36(2), 369–385.
- He, X., Zheng, Y., & Chen, Y. (2025). Weapons and influence: Unpacking the impact of Chinese arms exports on the UNGA voting alignment. *European Journal of Political Economy*, 87(C). <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2025.102666>
- Jervis, R. (1988). Realism, Game Theory, and Cooperation. *World Politics*, 40(3), 317–349. <https://doi.org/10.2307/2010216>
- Jolliffe, I. T. (2006). *Principal Component Analysis*. Springer Science & Business Media.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues* (SSRN Scholarly Paper No. 1682130). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=1682130>
- Keohane, R. O. (1989). *International institutions and state power: Essays in international relations theory*. Westview Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1973). Power and interdependence. *Survival*, 15(4), 158–165. <https://doi.org/10.1080/00396337308441409>
- Klugman, J., Rodriguez, F., & Choi, H.-J. (2011). The HDI 2010: New controversies, old critiques. *The Journal of Economic Inequality*, 9(2), 249–288. <https://doi.org/10.1007/s10888-011-9178-z>
- Kuik, C.-C. (2016). How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China. *Journal of Contemporary China*, 25(100), 500–514. <https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132714>

- Kuik, C.-C. (2021). Getting hedging right: A small-state perspective. *China International Strategy Review*, 3(2), 300–315. <https://doi.org/10.1007/s42533-021-00089-5>
- Kurtz, M. J., & Schrank, A. (2007). Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms. *The Journal of Politics*, 69(2), 538–554. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2007.00549.x>
- Lee, S. T. (2023). Vaccine diplomacy: Nation branding and China's COVID-19 soft power play. *Place Branding and Public Diplomacy*, 19(1), 64–78. <https://doi.org/10.1057/s41254-021-00224-4>
- Lowy Institute. (2024). *Power Index: Methodology*. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/publications/2024-asia-power-index-results>
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. WW Norton & Company.
- Moon, C., Jeong, S., & Gardner, S. (2021). Cold War Discourse and Geopolitical Flashpoints in Post-Covid-19 Northeast Asia. *JOURNAL FOR PEACE AND NUCLEAR DISARMAMENT*, 4, 284–307. <https://doi.org/10.1080/25751654.2021.1902120>
- Morgenthau, H. J. (1973). *Politics among nations*. <http://mangaldaicollege.digitallibrary.co.in/bitstream/123456789/728/1/Politics%20Among%20Nations.pdf>
- Nye Jr, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*.
- Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary. (2021, September 24). Indonesia Receives Two Million Vaccines from Chinese Government, Sinovac Company. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/en/indonesia-receives-two-million-vaccines-from-chinese-government-sinovac-company/>
- Parameswaran, P. (2016, April 6). *Indonesia Sinks 23 Foreign Vessels After China Spat*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2016/04/indonesia-sinks-23-foreign-vessels-after-china-spat/>
- Pasaribu, N. T., Tama, A. A., Azzari, M. K., & Gautama, I. (2025). Green Arms Race: Indonesia's Critical Minerals and its Sprint for Renewable Energy Sovereignty. *Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)*, 2(1), 27–47. <https://doi.org/10.70710/sitj.v2i1.30>
- Pevehouse, J. C. W. (2020). The COVID-19 Pandemic, International Cooperation, and Populism. *International Organization*, 74(S1), E191–E212. <https://doi.org/10.1017/S0020818320000399>

- Posocco, L., & Watson, I. (2023). Re-imagining the nation-state: An impetus from the pandemic. *Frontiers in Sociology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1086569>
- Singer, J. D. (1963). Inter-Nation Influence: A Formal Model. *American Political Science Review*, 57(2), 420–430. <https://doi.org/10.2307/1952832>
- Sulaiman, Y., Delanova, M., & Jati, R. (2021). Indonesia between the United States and China in a Post-Covid-19 World Order. *ASIA POLICY*, 16(1), 155–178.
- Surianta, A. (2024, February 20). *Prabowo's challenge: Cabinet continuity*. Lowy Institute. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/prabowo-s-challenge-cabinet-continuity>
- The Fund for Peace. (2023). *Fragile States Index Annual Report*. <https://fragilestatesindex.org/>
- Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, 9(4), 3–43. <https://doi.org/10.2307/2538540>
- Waltz, K. N. (2010). *Theory of international politics*. Waveland Press.
- Wei, I. S. C. (2024, August 26). *What's Behind the Resumption of China-Indonesia Military Exercises?* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2024/08/whats-behind-the-resumption-of-china-indonesia-military-exercises/>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511612183>
- Yuliantoro, N. R. (2022). The Politics of Vaccine Diplomacy and Sino-Indonesian Relations. *Jurnal Global & Strategis*, 16(1), 127–146. <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.127-146>
- Zubair, B., Waseem, S., & Shahid, K. (2023). Soft Power and Vaccine Diplomacy: An Analysis of China's Global Image Enhancement during the COVID-19 Pandemic. *BTTN Journal*, 2(2), 107–133. <https://doi.org/10.61732/bj.v2i2.73>